



PENERAPAN E-GOVERNMENT PADA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BANGGAI

Ni Luh Titi Indayani¹, Istiqamah Bungana²

Ilmu Pemerintahan¹, Ilmu Administrasi Negara², Universitas Tompotika Luwuk

Email : niluhyani48@gmail.com, istiqamahbungana2001@gmail.com

Abstrak

Tujuan dalam penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana Penerapan E-Government Pada Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Banggai dalam Meningkatkan inovasi daerah pada Badan Riset dan Inovasi Daerah. Metode dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data terukur yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam (depth interview) dengan informan 4 orang. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa E-government di BRIDA bukan hanya soal teknologi, tetapi transformasi budaya kerja pemerintah menuju layanan yang lebih cepat, tepat, murah, transparan, dan responsif, yang berkontribusi pada kemajuan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Penerapan e-government di BRIDA Kabupaten Banggai didukung terutama oleh kebijakan, anggaran, dan SDM yang melek teknologi. Pemerintah daerah menyediakan fasilitas dan anggaran riset, sementara masyarakat dan sektor swasta berperan dalam memberikan masukan dan teknologi. Inovasi teknologi seperti aplikasi e-signature dan layanan HKI elektronik meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik. E-government juga mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, responsif, dan akuntabel demi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Penerapan; E-government;; Badan Riset dan Inovasi

Abstract

The purpose of this research is to find out how the Implementation of E-Government at the Regional Research and Innovation Agency (BRIDA) of Banggai Regency improves regional innovation at the Regional Research and Innovation Agency. The method of data collection used in this research is qualitative data, namely measured data obtained from the results of in-depth interviews with informants. The results of this research can be concluded that E-government in BRIDA is not only about technology, but the transformation of government work culture towards faster, more precise, cheaper, transparent, and responsive services, which contribute to the progress of sustainable regional development. The implementation of e-government in BRIDA Banggai Regency is supported primarily by policies, budgets, and technology-savvy human resources. The local government provides research facilities and budgets, while the community and the private sector play a role in providing input and technology. Technological innovations such as e-signature applications and electronic IPR services increase transparency, efficiency, and the quality of public services. E-government also encourages more open, responsive, and accountable governance for sustainable regional development.

Keywords: Implementation; E-government; Research and Innovation Agency

Pendahuluan

Transformasi digital pemerintahan, khususnya penerapan e-government, sangat penting dan mendalam dalam konteks era digital saat ini. Transformasi digital di pemerintahan bukan sekadar mengadopsi teknologi terbaru, tetapi merupakan sebuah langkah strategis untuk menciptakan ekosistem pemerintahan yang efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan transformasi digital, proses administrasi dan birokrasi yang sebelumnya lambat dan berbelit dapat dipercepat secara signifikan. E-government menggantikan dokumen fisik dan prosedur manual dengan sistem berbasis online yang memungkinkan pelayanan publik menjadi lebih cepat dan mudah diakses oleh masyarakat kapan saja dan di mana saja. Hal ini penting karena tuntutan masyarakat modern semakin kompleks dan menuntut pelayanan yang praktis serta tanpa hambatan geografis atau waktu. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan melalui aplikasi-government hanya digunakan untuk tujuan yang sah dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (Sagala, 2020)

Transformasi digital meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Dengan menggunakan teknologi informasi, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi publik, sehingga mendorong pengawasan sosial dan pencegahan korupsi dalam administrasi pemerintahan. Hal ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperbaiki citra institusi publik. Transformasi digital juga memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis data yang lebih baik. Teknologi seperti big data dan kecerdasan buatan (AI) memungkinkan pemerintah mengelola dan menganalisis data secara efektif untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efisien dalam penyaluran sumber daya. Integrasi teknologi digital dalam pemerintahan merupakan keharusan untuk dapat beradaptasi dengan perubahan zaman yang cepat. Pemerintah tidak hanya harus mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga harus menyiapkan infrastruktur teknologi, memperkuat regulasi keamanan data, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar dapat mengoperasikan dan memanfaatkan teknologi secara optimal. E-government adalah proses penerapan teknologi informasi untuk memodernisasi struktur pemerintahan, meningkatkan pelayanan kepada warga negara, dan memperbaiki hubungan antara pemerintah dengan berbagai stakeholders (Heeks, 2006).

Penerapan e-government sangat penting untuk mengidentifikasi hambatan, peluang, strategi, dan dampak dari transformasi digital ini. Penelitian juga membantu pemerintah daerah dan pusat untuk mengembangkan strategi implementasi yang sesuai dengan kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan utama pemerintahan digital tercapai, yaitu pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Ruang lingkup keberhasilan *e-government* harus mencakup empat hal hubungan interaksi, yakni : *government to government* (G2G), *government to employee* (G2E), dan *government to citizen* (G2C) (Sari & Isnaeni, 2019: 85).

Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik dan mempercepat transformasi digital di seluruh instansi pemerintah. Salah satu inisiatif penting dalam kebijakan ini adalah pembentukan GovTech Indonesia, yang bertujuan untuk mengakselerasi inovasi dan digitalisasi layanan pemerintah. Dalam konteks ini, Perum Peruri ditunjuk sebagai pengelola GovTech, yang diharapkan dapat memfasilitasi integrasi dan inovasi dalam sistem pemerintahan. Inovasi adalah sebuah ide, praktik atau objek yang dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya (Rina, 2013).

Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 (Imania & Haryani, 2021) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mewajibkan semua instansi pemerintah untuk menerapkan sistem ini secara terintegrasi. Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan satu data, yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua data yang dimiliki oleh berbagai kementerian dan lembaga dapat saling diakses dan terstandarisasi. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, serta mempersiapkan negara untuk menghadapi tantangan digital di masa depan. Model implementasi *e-government* yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia masih bersifat general tanpa melihat situasi dan kondisi (kearifan lokal) pemerintah daerah yang ada (Sulistiyani & Susanto, 2018: 41).

Perkembangan pesat internet telah secara dramatis mengubah cara bisnis khususnya organisasi pemerintah beroperasi. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) hadir dalam kehidupan sehari-hari di seluruh dunia dan seharusnya meningkatkan standar hidup. Selain itu, pemerintah bekerja untuk memfasilitasi. Inovasi dalam pengambilan kebijakan dan kegiatan administrasi pemerintahan menjadi sangat penting, karena tanpa adanya inovasi, sistem pemerintahan akan mengalami kehancuran dan tidak efektif, kehilangan kemampuan untuk memerintah, dan menjadi sasaran kritik dan kegagalan (Farazmand, 2004: 19).

Kemajuan TIK yang sedang berlangsung pada Negara-negara berkembang untuk memperoleh teknologi tercanggih tetapi perubahan organisasi dan proses yang diperlukan dan implementasi yang efektif tampaknya lebih lambat dari yang diharapkan. Karena momentum implementasi E-Government dan penerimaan sistem tersebut oleh bisnis dan warga Negara, isu-isu yang terkait dengan pengembangan dan implementasi E-Government sistem menjadi lebih penting. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini memiliki pengaruh yang besar khususnya bagi organisasi pemerintahan. Perwujudan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, responsibel menjadi sebuah tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan (Choiriyah, 2020).

E-government merupakan salah satu bentuk penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas layanan agar menjadi lebih efektif dan efisien. Revolusi teknologi informasi telah mengubah lingkungan pemerintahan, di mana teknologi berbasis web memungkinkan pengelolaan data yang cepat dan pelimpahan informasi secara luas tanpa dibatasi oleh waktu dan

ruang. Indrayani menjelaskan bahwa penerapan e-government memungkinkan proses administrasi dan pelayanan publik dilakukan secara digital sehingga masyarakat bisa mengakses layanan tanpa batasan geografis dan waktu. Sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat berupa aplikasi seluler, portal layanan publik daring, hingga sistem informasi desa. Keunggulan utama sistem ini terletak pada efisiensi pengelolaan data, percepatan proses layanan, dan kemudahan akses bagi Masyarakat. Saat ini, E-Government telah menjadi topik populer, dimana setiap daerah mengimplementasikan dengan cara dan kinerja masing-masing dimulai sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden terkait kebijakan dan strategi nasional Pengembangan Pemerintah secara Elektronik (Syaepudin dan Nurlukman, 2022).

Perbup Nomor 24 Tahun 2022 berfungsi sebagai landasan hukum formal untuk digitalisasi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Banggai. Intinya, pemerintah daerah mewajibkan penggunaan sistem elektronik untuk menyelenggarakan ragam layanan publik, memperkuat integrasi antar-instansi, dan menjaga manajemen data serta layanan. Ini mencerminkan komitmen pada modernisasi birokrasi menuju pemerintahan yang lebih efisien dan responsif, meskipun dokumen lengkapnya belum tersedia secara publik namun terdaftar di JDIH Kabupaten Banggai.

Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Banggai merupakan salah satu Badan yang menerapkan kebijakan e-government dalam upaya peningkatan pelayanan publik. Dengan potensi sumber daya alam dan demografi yang beragam, pelayanan publik yang baik menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerapan kebijakan ini diharapkan bisa menjawab tantangan dalam memberikan layanan yang cepat, transparan, dan akuntabel.

Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu peneliti berusaha menjelaskan atau mendeskripsikan secara terperinci dan mendalam tentang penerapan e-government pada badan riset dan inovasi daerah kabupaten banggai. Penelitian ini bertempat di Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Banggai Pertimbangan peneliti dalam memilih lokasi penelitian dikarenakan E-government di BRIDA Kabupaten Banggai mungkin belum sepenuhnya efektif. Penentuan informan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara memilih responden atau objek secara sengaja berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian dengan jumlah informan 4 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama yang menjadi objek penelitian melalui Teknik observasi, dan wawancara. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui teknik Dokumentasi, dalam proses dokumentasi peneliti melakukan pencarian data dengan menelaah berbagai literatur atau dokumen lainnya yang dianggap relevan

dengan permasalahan penelitian, kemudian menambahkan beberapa gambar sesuai keadaan dilapangan yang bertujuan untuk mengungkap hasil penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan E-Government Pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kab. Banggai

E-government atau pemerintahan berbasis elektronik adalah sebuah konsep dan upaya yang mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh pemerintah untuk menyelenggarakan layanan publik secara digital. Hal ini meliputi segala bentuk interaksi antara pemerintah dengan warga negara, dunia usaha, dan lembaga lain melalui platform digital seperti situs web, aplikasi mobile, dan sistem manajemen informasi yang terintegrasi. Tujuan utama e-government adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, kualitas pelayanan publik, dan aksesibilitas, sehingga masyarakat dapat berinteraksi dengan pemerintah dengan cara yang lebih mudah, cepat, dan akuntabel.

1. Support (Dukungan)

Support atau dukungan merupakan tekad dan komitmen dari pejabat publik serta seluruh pihak terkait untuk benar-benar menerapkan dan mengembangkan e-government. Dukungan ini meliputi penyediaan anggaran, kebijakan, regulasi, infrastruktur teknologi, serta pelatihan sumber daya manusia. Tanpa adanya dukungan ini, penerapan e-government tidak akan berjalan optimal karena berbagai inisiatif dan pembangunan sistem elektronik pemerintahan sangat tergantung pada kesiapan dan komitmen semua pihak terkait. Dukungan ini juga menjadi fondasi penting agar proses digitalisasi pelayanan publik bisa berjalan lancar, efektif, dan berkelanjutan.

Keberhasilan penerapan e-government di BRIDA Kabupaten Banggai sangat bergantung pada dukungan yang menyeluruh dan sinergis dari berbagai pihak. Dukungan kebijakan dari pimpinan menjadi fondasi utama, diikuti oleh dukungan anggaran dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk mendukung inovasi dan riset yang relevan dengan kebutuhan lokal. Selain itu, peran aktif masyarakat sebagai pengguna serta sektor swasta sebagai mitra penyedia teknologi dan inovasi juga sangat penting untuk memastikan e-government berjalan efektif, transparan, dan berkelanjutan. Keterpaduan dukungan dari pimpinan, pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci kesuksesan program e-government di BRIDA.

2. Capacity (Kapasitas)

Kapasitas merupakan kemampuan pemerintah untuk mengelola dan menerapkan teknologi informasi secara efektif dalam memberikan pelayanan publik. Hal ini mencakup kesiapan sumber daya seperti infrastruktur teknologi, sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan pengetahuan, serta ketersediaan dana yang memadai untuk mendukung berbagai inisiatif e-government. Kapasitas ini juga melibatkan kemampuan pemerintah dalam merencanakan, mengelola, dan menjalankan sistem

digital agar pelayanan yang diberikan dapat berlangsung secara efisien, cepat, tepat, dan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tanpa adanya kapasitas yang memadai, penerapan e-government tidak akan berjalan dengan baik dan tidak akan memberikan nilai tambah yang diharapkan oleh publik.

Kesimpulan secara keseluruhan terkait kapasitas dalam penerapan e-government di BRIDA peneliti dapat menyimpulkan bahwa BRIDA memiliki sumber daya manusia yang cukup siap dalam teknologi informasi, didukung oleh mayoritas pegawai milenial yang melek IT dan berbagai pelatihan teknis. Namun, pengembangan kapasitas riset masih diperlukan karena latar belakang peneliti di BRIDA terbatas. BRIDA juga berhasil mengaplikasikan teknologi melalui inovasi seperti aplikasi Mangail Jo untuk nelayan dan layanan elektronik HKI Apel Siaga untuk mempermudah pelayanan publik. Secara keseluruhan, BRIDA telah memanfaatkan teknologi dan inovasi secara efektif untuk mendukung pembangunan daerah, meskipun penguatan sumber daya riset tetap menjadi fokus penting ke depan agar lembaga ini dapat berfungsi optimal sebagai penggerak inovasi dan pelayanan publik yang responsif.

3. Value (Nilai/Manfaat)

E-government memberikan manfaat yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Dengan penerapan e-government, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memberikan pelayanan publik. Layanan menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat kapan saja dan dari mana saja tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan. Informasi yang tersedia secara digital memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan data yang lengkap dan up to date, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik dan terinformasi. Selain itu, e-government meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan karena setiap proses dan kebijakan dapat diawasi oleh publik, yang pada akhirnya juga mengurangi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. E-government mengurangi biaya administrasi dan interaksi karena sebagian besar proses dilakukan secara elektronik, sehingga mempercepat koordinasi antar lembaga pemerintah dan memperbaiki komunikasi dengan masyarakat. Masyarakat juga lebih diberdayakan karena mereka dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan publik melalui media digital. Hal ini menciptakan pemerintahan yang responsif, transparan, dan demokratis serta mendorong pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, e-government bukan hanya mempermudah pelayanan, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Kesimpulan Secara keseluruhan, pendapat-pendapat yang telah disampaikan menunjukkan bahwa BRIDA Kabupaten Banggai mengedepankan transparansi dan partisipasi luas stakeholder dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan program riset serta inovasi daerah. Penerapan e-government di BRIDA berdampak signifikan dalam mempercepat, mempermudah, dan mengefisienkan pelayanan publik melalui inovasi teknologi seperti e-signature. Pendekatan ini tak hanya mempercepat pelayanan

dan memangkas jarak, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat. Dengan melibatkan berbagai pihak mulai dari perangkat daerah, universitas, jurnalis, hingga organisasi masyarakat, BRIDA berhasil menciptakan kolaborasi yang kuat untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program inovatif sesuai kebutuhan semua pihak dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, e-government dan keterbukaan terhadap masukan stakeholder menjadi dasar utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan inovatif di Kabupaten Banggai.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

E-government di BRIDA bukan hanya soal teknologi, tetapi transformasi budaya kerja pemerintah menuju layanan yang lebih cepat, tepat, murah, transparan, dan responsif, yang berkontribusi pada kemajuan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Penerapan e-government di BRIDA Kabupaten Banggai didukung terutama oleh kebijakan, anggaran, dan SDM yang melek teknologi. Pemerintah daerah menyediakan fasilitas dan anggaran riset, sementara masyarakat dan sektor swasta berperan dalam memberikan masukan dan teknologi. Inovasi teknologi seperti aplikasi e-signature dan layanan HKI elektronik meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik. E-government juga mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, responsif, dan akuntabel demi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Bibliografi

Pustaka yang berupa judul buku

- Farazmand, A. (2004). Sound Governance in the Age of Globalization. In Sound governance : policy and administrative innovations (First, hal. 19). United State of America: Praeger Publisher.
- Heeks, R. (2006). Implementing e-Government: A Practical Guide to Successful Implementation. Sage Publications.

Pustaka yang berupa jurnal ilmiah

- Choiriyah, I. U. (2020). Penerapan e-government melalui m-bonk di Kabupaten Sidoarjo. *Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 5(2), 126-135.
- Mirnasari, Rina Mei. Inovasi Pelayanan Publik UPTD Terminal Purabaya Bungurasih. Universitas Airlangga. 2013. Volume 1. journal.unair.ac.id/downloadfullpapers10%20Rina_KMP%20V1%20N1%20Jan%20April%202013.pdf diakses pada 28 Mei 2018
- Sari, T. P., & Isnaeni, R. (2019). E-Government : Teknologi Melawan Korupsi. *Jurnal Teknologi Informasi ESIT*, XIV(02), 83–88.

- Sulistiyani, E., & Susanto, T. D. (2018). A Conceptual Model of Change Management for E-Government Project in Indonesia. In *The 4th International Seminar on Science and Technology* (hal. 39–42). Surabaya: Postgraduate Program Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya, Indonesia. <https://doi.org/10.12962/j23546026.y2019i1.5104>
- Sagala, M. (2020). Pengaruh Implementasi J-Mbako Terhadap Kepatuhan Pajak Daerah di Kabupaten Jember. *Jurnal Administrasi Negara*, 10(2), 150-160
- Syaepudin, Bahrul., dan Nurlukman, A. Dwiyanto. (2022). Kualitas Pelayanan Publik Melalui EGovernment dengan Aplikasi Tangerang Gemilang. *Jurnal Pekommas*, Volume 7 Nomor 1 Tahun 2022, hlm. 53-62. <https://dx.doi.org/10.30818/jpkm.2022.2070106>.